

LAPORAN AKHIR MAGANG

**ANALISIS IMPLEMENTASI APLIKASI *FINANCIAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM* (FMIS) PADA BADAN PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPPKAD)
KABUPATEN CILACAP**



Indah Aprilia Putri

Student Number : 20312419

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2024

LAPORAN AKHIR MAGANG MAHASISWA

**“ANALISIS IMPLEMENTASI APLIKASI *FINANCIAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM* (FMIS) PADA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPPKAD)
KABUPATEN CILACAP”**

Dibuat oleh :

Indah Aprilia Putri

Students Number : 20312419

Disahkan oleh :

Yogyakarta, 17 Januari 2024

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Reny Lia Riantika S.E., Ak., M.Acc.

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indah Aprilia Putri

NIM : 20312419

Fakultas : Bisnis dan Ekonimika

Judul : Analisis Implementasi Aplikasi *Financial Management Information System* (FMIS) pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Cilacap.

Dengan ini menyatakan bahwa laporan magang ini bebas plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam laporan magang ini, saya bersedia menerima sanksi apapun sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan.

Yogyakarta, 17 Januari 2024



Indah Aprilia Putri

NIM : 20312419

HALAMAN MOTTO

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”

(Qs. Ar-Rum : 60)

“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Qs. Al- Insyirah : 5-6)

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Mahasiswa : Indah Aprilia Putri

NIM : 20312419

Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Laporan akhir magang ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri tanpa bantuan dari pihak manapun selain pembimbing dan narasumber yang berkaitan dan bukan merupakan tiruan, salinan atau duplikasi dari pihak lain.
2. Laporan akhir magang ini sebelumnya belum pernah dipublikasikan dalam bentuk apapun baik di lingkungan Universitas Islam Indonesia maupun perguruan tinggi lainnya.

Yogyakarta, 17 Januari 2024



Indah Aprilia Putri

NIM : 20312419

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat mampu menyelesaikan laporan akhir magang yang berjudul “Analisis Implementasi Aplikasi *Financial Management Information System* (FMIS) pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Cilacap“. Laporan akhir magang ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi sarjana (S-1) Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang bertujuan memperkaya wawasan dan mempertajam ilmu pengetahuan khususnya dibidang akuntansi.

Dalam penyusunan laporan akhir magang, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian laporan akhir magang ini tidak terlepas dari dukungan, semangat, serta bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang dengan izin-Nya penulis diberi kesempatan, kemudahan, dan kelancaran sehingga penulis bisa menyelesaikan proposal magang ini.
2. Ibu Reny Lia Riantika S.E., Ak., M.Acc. selaku dosen pembimbing penulis yang banyak memberikan ilmu, bimbingan, masukan, dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan proposal magang ini.
3. Orang tua tercinta Ibu Ngadilah dan Bapak Gunawan yang selalu menjadi semangat penulis, sandaran terkuat penulis untuk tetap hidup di dunia ini, yang tiada hentinya memberikan kasih sayang doa serta motivasi dengan penuh keikhlasan yang tak terhingga kepada penulis. Terima kasih selalu berjuang dan mendampingi penulis di kehidupan ini.
4. Reni Eka Setyowati, Rudi Kurniawan, Ervi Kumalasari, Ika Nurhidayah, Luthfianti Amartya selaku saudara yang penulis sayangi yang selalu memberikan dorongan dalam hal apapun sehingga penulis mampu menyelesaikan proposal magang.
5. Kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Cilacap yang telah membantu mendapatkan data-data yang dibutuhkan penulis.

6. Ibu Siti Aminah, Ibu Indah, Ibu Aristy, Bapak Zuhri, Bapak Wahyu, Bapak Agung, Ibu Nita, Bapak Sudaryanto dan rekan lainnya yang telah membimbing dan berbagi ilmu tentang Akuntansi dan Pelaporan serta telah memberikan bimbingan dan arahan selama magang sehingga penulis mampu menyelesaikan Laporan magang dengan baik.
7. Chasilia Nur Rahmawati, Rizkia Alviatri, Syahra Aleydia Aziz teman seperjuangan kuliah sejak awal hingga saat ini yang selalu memberikan dukungan, bantuan dan semangat selama proses perkuliahan hingga saat ini.
8. Sinta Nur Fatonah, Adam Marwarji, Rony Sulaiman teman seperjuangan sejak 10 tahun yang lalu hingga sekarang yang selalu support, menghibur dan teman bercerita terkait banyak hal positif dan selalu ada ketika penulis dalam keadaan apapun.
9. Diri saya sendiri, Indah Aprilia Putri atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga berhasil untuk tidak menyerah menghadapi kerasnya dunia semoga diri ini semakin kuat untuk menghadapi dunia yang lebih keras kedepannya.
10. Semua pihak yang ikut andil dalam membantu dan memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa saya sebutkan satu satu.

Penyusunan laporan akhir magang ini disusun dengan sebaik baiknya, namun penulis sadar laporan akhir magang ini masih jauh dari kata sempurna dimana terdapat kekurangan dan kesalahan di dalam laporan akhir magang ini, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat diharapkan. Dan semoga laporan akhir magang ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca.

Yogyakarta, 17 Januari 2024



Indah Aprilia Putri

NIM : 20312419

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Magang	3
1.4 Manfaat Magang	4
1.4.1 Bagi Mahasiswa.....	4
3.4.2 Bagi BPPKAD Kabupaten Cilacap	4
3.4.3 Bagi Universitas Islam Indonesia	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA	5
2.1 Teori Implementasi	5
2.2 Model Implementasi George C. Edward III.....	5
2.3 Sistem Informasi	6
2.4 <i>Financial Management Information System (FMIS)</i>	6
2.5 Kajian Penelitian Sebelumnya	8
2.6 Kerangka Konseptual	11
BAB III METODE PENELITIAN	12
3.1 Jenis Penelitian.....	12
3.2 Sumber dan Data Penelitian	12
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	13
3.4 Teknik Analisis Data.....	13
BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM MAGANG	16
4.1 Profil Perusahaan	16

4.1.1 Kedudukan BPPKAD	16
4.1.2 Tugas dan Fungsi.....	16
4.1.3 Visi dan Misi	17
4.1.4 Susunan Organisasi.....	17
4.2 Rencana Program Magang	17
4.2.1 Tempat dan Waktu Kegiatan	17
4.3 Data Peserta.....	18
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	20
5.1 Hasil Penelitian	20
5.2 Pembahasan.....	24
5.2.1 Analisis Implementasi Aplikasi <i>Financial Management Information System (FMIS)</i>	24
5.2.2 Analisis Kendala Pengimplementasian Aplikasi <i>Financial Management Information System (FMIS)</i>	27
5.2.3 Analisis upaya mengatasi kendala Pengimplementasian Aplikasi <i>Financial Management Information System (FMIS)</i>	29
5.3 Kesimpulan dan Saran	30
DAFTAR PUSTAKA	33
LAMPIRAN	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Konseptual.....	11
Gambar 4.1	Visi dan Misi.....	17
Gambar 4.2	Susunan Organisasi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Cilacap.....	17

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Sebelumnya	8
Tabel 4.1	Kegiatan Magang	18
Tabel 5.1	Pelaksanaan Implementasi Aplikasi <i>Financial Management Information System</i> (FMIS).....	20
Tabel 5.2	Kendala pengimplementasian Aplikasi <i>Financial Management Information System</i> (FMIS) terhadap pengelolaan keuangan pada BPPKAD Kabupaten Cilacap.....	23
Tabel 5.3	Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala pengimplementasian Aplikasi <i>Financial Management Information System</i> (FMIS) terhadap pengelolaan keuangan pada BPPKAD Kabupaten Cilacap	24

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Curriculum Vitae Indah Aprilia Putri	36
Lampiran 2.	Surat keterangan selesai magang	37
Lampiran 3.	Buku peraturan bupati cilacap.....	38
Lampiran 4.	Tampilan FMIS	39
Lampiran 5.	Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran BLUD	40
Lampiran 6.	SP2BP	41
Lampiran 7.	SPB BOK Puskesmas	42
Lampiran 8.	Jurnal Umum.....	43
Lampiran 9.	Rincian Saldo Buku Besar	44
Lampiran 10.	Lembar Pertanggungjawaban Fungsional.....	45
Lampiran 11.	Laporan Neraca dari FMIS	46
Lampiran 12.	Laporan Realisasi Anggaran dari FMIS.....	47
Lampiran 13.	Dokumentasi Sosialisasi PERBUP Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap	48
Lampiran 14.	Dokumentasi Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Sabili & Sunaningsih (2022), Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) merupakan sebuah badan akuntansi dan pelaporan yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) adalah entitas pemerintah yang memiliki fungsi penting dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam suatu wilayah yurisdiksi. Keberadaan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas, keterbukaan, dan tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah (Tampang *et al.*, 2022). Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) bertanggung jawab atas perencanaan strategis, administrasi yang efisien, pengawasan yang efektif, dan pemanfaatan uang publik dan aset daerah, sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam PERBUP Kabupaten Cilacap Nomor 167 Tahun 2020, setiap bidang di bawah BPPKAD memiliki tanggung jawab dan peran tertentu.

Di era saat ini yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi yang signifikan, penggunaan sistem informasi menjadi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas prosedur akuntansi di lembaga publik. Pengelolaan data khususnya pada data keuangan pemerintah daerah harus diimbangi dengan pemanfaatan teknologi informasi yang tepat supaya menghasilkan data yang efektif dan efisien. PP Nomor 12 Tahun 2019 berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah mencakup seluruh proses, termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggung jawaban keuangan daerah (Warongan *et al.*, 2022). Adapun petunjuk teknis terkait pengelolaan keuangan daerah diatur dalam PEMENDAGRI Nomor 77 tahun 2020 yang telah disesuaikan dengan sistem informasi yang dirancang untuk memudahkan pengelolaan keuangan daerah.

Pentingnya sistem informasi dalam pengelolaan data, khususnya pada pemerintah daerah seperti Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah (BPPKAD) Kabupaten Cilacap, mengharuskan diterapkannya sebuah sistem yang komprehensif yang mampu memfasilitasi seluruh kegiatan operasionalnya. Sistem ini biasa disebut dengan Sistem Informasi Manajemen (Kinasih, 2022). Sistem informasi manajemen digunakan di pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi kinerja pemerintah atau organisasi. Pengelolaan data yang efektif membutuhkan sistem informasi yang dapat menyediakan penyimpanan data yang aman. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141 / KMK.07 / 2001 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Pasal 1 menyebutkan bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah atau SIKD merupakan salah satu wadah yang diberikan oleh menteri keuangan untuk mengumpulkan, memvalidasi, mengolah, menganalisis data dan menyediakan informasi keuangan daerah guna merumuskan kebijakan dalam pembagian dana hingga evaluasi kinerja keuangan daerah, pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap memiliki sistem informasi untuk menunjang kegiatannya yang dikenal dengan *Financial Management Information System* (FMIS).

Pengenalan dan pemanfaatan *Financial Management Information System* (FMIS) merupakan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi yang diimplementasikan sebagai alat pengelolaan keuangan dalam bentuk sistem informasi yang di komputerisasi bagi pemerintah daerah. Di era Revolusi Industri 4.0, teknologi informasi memainkan peran penting dalam memfasilitasi operasi dan manajemen pemerintahan, yang secara signifikan berdampak pada efektivitas pemerintah dalam memanfaatkan teknologi informasi. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mengamanatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan publik. Pemerintah dituntut untuk memanfaatkan dan menggunakan kemajuan teknologi informasi untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara efektif dan bertanggung jawab atas hasil pengelolaan keuangan sesuai dengan kewajiban dan perannya dalam mencapai pembangunan yang baik. Teknologi informasi yang menggunakan web basis seperti *Financial Management Information System* (FMIS) akan mengalami beberapa kendala yang mungkin akan mempengaruhi penerapan teknologi informasi dalam penyusunan laporan keuangan yaitu berhubungan dengan kondisi perangkat lunak

hingga perangkat keras yang digunakan. Rumondor et al. (2023) mengatakan bahwa FMIS merupakan sistem yang digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah dimulai dari tahapan pelaksanaan hingga pertanggungjawaban serta untuk penunjang dalam penyusunan LKPD.

Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 391, Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan informasi Pemerintah Daerah melalui sistem Informasi Pemerintah Daerah. Akibatnya, pemerintah daerah mengalami penyesuaian dan perubahan. Seluruh pengelola keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap menghadapi tantangan yang sama ketika menggunakan aplikasi FMIS berbasis web yang baru. Tantangan-tantangan ini menghambat kemampuan mereka untuk melaksanakan kegiatan secara efektif di BPPKAD Kabupaten Cilacap.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Aplikasi *Financial Management Information System* (FMIS) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi saat implementasi Aplikasi *Financial Management Information System* (FMIS) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala saat implementasi Aplikasi *Financial Management Information System* (FMIS) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap?

1.3 Tujuan Magang

Kegiatan magang ini dilaksanakan untuk menguji :

1. Untuk mengetahui implementasi Aplikasi *Financial Management Information System* (FMIS) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Cilacap.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi saat pengimplementasian Aplikasi *Financial Management Information System* (FMIS) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Cilacap

3. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala saat pengimplementasian Aplikasi *Financial Management Information System (FMIS)* pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Cilacap.

1.4 Manfaat Magang

1.4.1 Bagi Mahasiswa

1. Memberikan pengalaman dan wawasan mengenai dunia kerja secara nyata, melatih kedisiplinan, mental hingga rasa percaya diri dalam mempersiapkan terjun dalam dunia kerja.
2. Membantu mengimplementasikan ilmu pengetahuan khususnya Akuntansi yang didapat selama masa perkuliahan ke dalam dunia kerja.
3. Meningkatkan pengetahuan mengenai sistem akuntansi yang diterapkan oleh instansi tersebut.

3.4.2 Bagi BPPKAD Kabupaten Cilacap

1. Membantu meningkatkan efektifitas dan efisiensi perusahaan secara maksimal dalam kegiatannya.
2. Mendapatkan sudut pandang baru yang akan membantu perusahaan dalam berinovasi kedepannya.
3. Memungkinkan terjalinnya hubungan yang baik antara instansi terkait dengan perguruan tinggi.

3.4.3 Bagi Universitas Islam Indonesia

1. Sebagai langkah untuk mempersiapkan SDM yang berkualitas sehingga dapat melahirkan SDM yang siap untuk menghadapi dunia kerja.
2. Menciptakan relasi yang baik dan luas antar Universitas Islam Indonesia dengan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Cilacap.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori Implementasi

Dalam pelaksanaan kebijakan publik implementasi merupakan salah satu tahap yang cukup penting, karena agar tujuan suatu organisasi dapat tercapai perlu adanya kegiatan dan tindakan secara nyata melalui proses implementasi. Seperti yang didefinisikan oleh KBBI, istilah "implementasi" mengacu pada tindakan menerapkan atau melakukan operasi tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi adalah proses melakukan aksi atau mekanisme dasar di dalam suatu sistem. Ini melibatkan aktivitas terstruktur yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. (Usman, 2002).

George E III (1980) implementasi adalah fase dimana suatu kebijakan diterapkan dengan efektif dan berhasil mencapai tujuannya. Kesimpulan dari beberapa pendapat para ahli implementasi serangkaian langkah dan aktivitas terstruktur yang diperlukan untuk menjalankan suatu kebijakan atau sistem secara efektif guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

2.2 Model Implementasi George C. Edward III

Teori model implementasi yang dikemukakan oleh (Edward, 1984) menurut Nugroho (2017) implementasi melibatkan empat variabel yang saling berkaitan dalam pelaksanaannya yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, meskipun demikian terdapat perbedaan penilaian dari masing-masing variabel tersebut, dimana variabel komunikasi dan sumber daya organisasi dianggap lebih signifikan. Namun secara teoritis setiap variabelnya tetap memiliki peran yang sama pentingnya dalam seluruh rangkaian proses implementasi kebijakan.

Menurut Edward III dalam Widodo (2007:98) komunikasi merupakan serangkaian bentuk penyampaian informasi yang perlu untuk disampaikan kepada penggunanya agar pengguna dapat mengetahui apa yang harus mereka lakukan untuk menjalankan kebijakannya, selain itu sumber daya memiliki peran yang cukup tinggi dalam penerapan suatu kebijakan, dalam hal ini sumber daya yang dimaksud yaitu sumber daya manusia dan sumber daya penunjang seperti sarana dan prasarana yang disediakan.

2.3 Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan suatu sistem yang terdapat pada suatu organisasi yang mengintegrasikan kebutuhan pengolahan transaksi yang mendukung fungsi operasional serta manajerial suatu organisasi, selain itu sistem juga menyediakan informasi untuk para *stakeholder* (Rumondor et al., 2023).

Nasution & Nurwani (2021) tujuan dari sistem informasi untuk menghasilkan sebuah informasi, sistem informasi merupakan data yang diolah yang nantinya dapat digunakan oleh para penggunanya tetapi tidak sesederhana hanya data yang diolah saja tetapi sistem informasi ini mengolah data secara tepat baik dari segi waktu hingga untuk siapa dan untuk apa data itu digunakan. Berdasarkan pemahaman yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi dalam suatu organisasi tidak hanya berfungsi untuk kebutuhan pengelolaan data transaksi operasional dan manajerial, tetapi juga bertujuan untuk menghasilkan suatu informasi yang bermanfaat. Sistem informasi juga tidak hanya mencakup pengelolaan data menjadi data yang berguna tetapi juga menekankan pentingnya ketepatan waktu, sasaran penggunanya, dan tujuan dari penggunaan data tersebut. Oleh karena itu, sistem informasi pada sebuah organisasi menjadi kunci dalam menyediakan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan /*stakeholder*.

2.4 *Financial Management Information System (FMIS)*

Perubahan zaman, kemajuan teknologi, dan peraturan pemerintah telah mempengaruhi kebutuhan para pemangku kepentingan. Salah satu peraturan tersebut adalah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, yang berfokus pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Peraturan ini menekankan perlunya pengembangan data, keuangan, dan kinerja daerah di tingkat nasional untuk memfasilitasi pengambilan keputusan dan pemantauan kebijakan. Selain itu, peraturan ini juga mengakui perlunya aplikasi dan unit organisasi yang saling terhubung untuk memenuhi kebutuhan data nasional. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan aplikasi SIMDA dalam hal kemajuan teknologi dan kepatuhan terhadap peraturan. Transformasi SIMDA menjadi SIMDA *Next-G* dilakukan untuk memungkinkan BPKP meningkatkan dan menegakkan standar akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, inisiatif ini juga bertujuan

untuk memastikan bahwa aplikasi SIMDA tetap up-to-date dan sesuai dengan perkembangan zaman. Aplikasi SIMDA Next-G berbasis Web atau lebih dikenal dengan *Financial Management Information System* (FMIS) merupakan hasil pengembangan aplikasi SIMDA oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Seperti yang dikatakan oleh Prastyo (2023) SIMDA merupakan penyedia informasi yang cepat, tepat, akurat serta lengkap untuk menunjang segala kegiatan dari pengelolaan keuangan hingga penyusunan kebijakan sehingga SIMDA selalu mengalami pembaruan sistem untuk memudahkan para penggunaanya.

Rumondor et al. (2023) menjelaskan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah pada BKAD Provinsi Sulawesi Utara digunakan dua aplikasi yang saling berhubungan, yaitu SIPD dan FMIS untuk belanja daerah. Aplikasi SIPD digunakan untuk mencatat atau menginput transaksi yang telah direalisasikan dengan SP2D, sedangkan aplikasi FMIS digunakan untuk mencatat atau menginput data-data penatausahaan. Pada BPPKAD Kabupaten Cilacap *Financial Management Information System* (FMIS) merupakan aplikasi baru yang sudah digunakan oleh seluruh bidang pada BPPKAD. *Financial Management Information System* (FMIS) ini merupakan sistem yang dikembangkan dari basis SIMDA dengan tujuan untuk mempermudah manajemen keuangan daerah. Didalam *Financial Management Information System* (FMIS) antara lain :

1. Perencanaan Lima Tahunan

Dalam menu ini berisi terkait input data perencanaan lima tahunan yang dilakukan oleh fungsi perencanaan pada pemerintah daerah.

2. Perencanaan Tahunan

Dalam menu ini berisi terkait input data perencanaan tahunan yang dilakukan oleh fungsi perencanaan pada pemerintah daerah.

3. Penganggaran

Dalam menu ini berisi terkait input data perencanaan tahunan yang dilakukan oleh fungsi perencanaan pada pemerintah daerah.

4. Penatausahaan

Dalam menu ini berisi terkait input seluruh transaksi keuangan yang dilakukan baik penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun anggaran yang dilakukan oleh fungsi penatausahaan pada Pemerintah Daerah.

5. Pelaporan

Dalam menu ini menghasilkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas.

6. SAKIP

Dalam menu ini menghasilkan input kinerja pemerintah daerah sesuai dengan pertanggungjawaban.

Pada BPPKAD Kabupaten Cilacap segala kegiatan dalam pengelolaan keuangan daerah sudah dilakukan menggunakan aplikasi FMIS, artinya dari penginputan transaksi hingga penatausahaan sudah menggunakan aplikasi FMIS seperti yang dilakukan oleh bidang akuntansi dan pelaporan pada BPPKAD dimana bidang tersebut menghasilkan output yaitu beberapa laporan dari aplikasi FMIS antara lain Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional hingga Laporan Tahunan yang semuanya diolah menggunakan aplikasi FMIS.

2.5 Kajian Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya

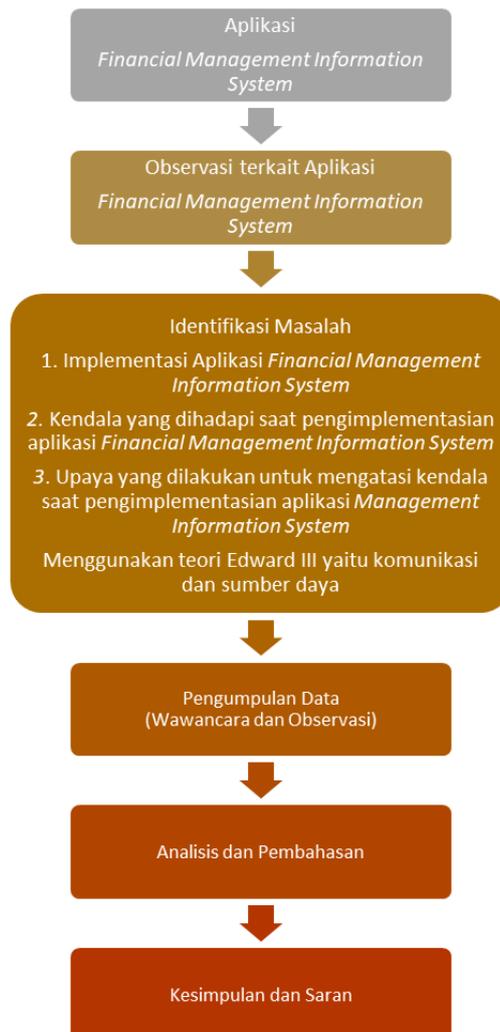
No	Penulis	Judul	Objek	Hasil
1	Inzany et al. (2022)	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Perencanaan Pendapatan dan Belanja Daerah		Temuan studi menunjukkan bahwa komponen yang mempengaruhi hasil adalah sumber daya manusia dan sumber daya nonmanusia, termasuk infrastruktur dan keuangan. Isu-isu pendukung muncul, sehingga sangat penting untuk meningkatkan daya dukung untuk meningkatkan pencapaian organisasi.
2	Tumanduk et al. (2022)	Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran	Badan Pendapatan Daerah Provinsi	Temuan dari riset ini menyatakan bahwa terjadi peralihan perangkat lunak aplikasi dari Sistem Informasi

No	Penulis	Judul	Objek	Hasil
		Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Sulawesi Utara	Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) ke Sistem Informasi Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah (FMIS), yang mengakibatkan penggunaan awal aplikasi FMIS masih belum optimal. Beberapa kendala muncul pada tahap awal penerapan, seperti keberadaan beberapa menu yang masih belum lengkap, sulitnya akses jaringan yang mempengaruhi kinerja aplikasi, dan seringkali terjadi kesalahan dalam aplikasi. Situasi ini menyebabkan terhambatnya proses pengumpulan data dan dokumen dasar untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan, khususnya Laporan Realisasi Anggaran (LRA) di setiap Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah (UPTB). Akibatnya, proses penyusunan dan penyajian LRA mengalami keterlambatan yang signifikan. Dalam menghadapi kendala-kendala tersebut, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (BAPENDA) selalu berupaya untuk tetap mengikuti perkembangan dan perbaikan yang dilakukan pada aplikasi FMIS ini.
3	Nasution & Nurwani (2021)	Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan	BPKAD Kota Medan	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kota Medan telah melakukan kebijakan yang diperlukan untuk menunjang kegiatannya, serta SIPD berfungsi untuk memuat sistem perencanaan

No	Penulis	Judul	Objek	Hasil
4	Rumondor et al. (2023)	Analisis Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Dalam Pelaksanaan Belanja Daerah Pada BKAD Provinsi Sulawesi Utara	BKAD Provinsi Sulawesi Utara	<p>pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah.</p> <p>Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa implementasi aplikasi sistem informasi dalam pengelolaan keuangan daerah BKAD Provinsi Sulawesi Utara memerlukan pentingnya komunikasi, koordinasi dan pengelolaan sumber daya yang efektif untuk keberhasilan sistem informasi yang digunakan untuk pengelolaan keuangan pemerintah daerah, penelitian ini juga menekankan perlu ada peningkatan secara terus menerus sumber daya untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan.</p>

2.6 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yaitu hubungan antar konsep dari masalah yang akan diteliti (Setiadi, 2023). Kerangka konseptual adalah struktur konsepsi atau ide pokok yang menjadi dasar pemahaman suatu penelitian, membantu mengidentifikasi hubungan antar konsep dan merinci kerangka kerja penelitian. Penelitian yang efektif memerlukan langkah-langkah yang sistematis untuk mengumpulkan data dimana jika dilakukan dengan tepat akan menghasilkan penelitian yang terstruktur. Oleh karena itu, kerangka konseptual diperlukan untuk mendukung arah dan kualitas penelitian. Sehingga penelitian yang dilakukan dapat dipertahankan kebenarannya.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah penelitian dimana proses analisis atau proses untuk menjawab suatu penelitian yang tidak berdasar pada angka atau parameter statistik, pembahasan dari proses penelitian kualitatif ini berdasarkan pada penjelasan secara naratif.

Menurut Sugiyono (2018:213) metode penelitian kualitatif adalah sebuah pendekatan terhadap studi ilmiah yang berlandaskan pada perspektif filosofis. Dalam pendekatan ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama. Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan ini menghasilkan data kualitatif. Tujuan utama dari teknik penelitian kualitatif adalah untuk meneliti dan menjelaskan fenomena atau subjek penelitian melalui pengamatan interaksi sosial, sikap, dan persepsi orang atau kelompok. Peneliti kualitatif memiliki keyakinan mengenai proses pengujian teori deduktif, strategi untuk mengurangi bias, kontrol elemen kontrafaktual, dan kapasitas untuk menggeneralisasi dan mereplikasi temuan mereka.

3.2 Sumber dan Data Penelitian

Sujarweni (2019) sumber data mengacu pada entitas dari mana data penelitian diperoleh. Ketika peneliti mengumpulkan data melalui kuesioner atau wawancara, orang yang memberikan respons atau menjawab pertanyaan disebut responden. Mereka dapat memberikan jawaban dalam bentuk tertulis atau lisan.

Penelitian ini mengumpulkan data secara langsung dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Cilacap. Data yang digunakan oleh peneliti meliputi data primer dan sekunder. Sugiyono (2019), sumber data adalah sebagai berikut :

1. Data primer adalah data yang bersumber langsung dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Cilacap dan diberikan kepada pengumpul data atau peneliti.
2. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Cilacap.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Para peneliti melakukan penelitian dengan tujuan untuk memperoleh data, oleh karena itu prosedur pengumpulan data merupakan tahap yang krusial dan utama dalam sebuah penelitian. Tanpa memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti tidak dapat melaksanakan penelitiannya. Menurut Sugiyono (2013) prosedur pengumpulan data merupakan tahap yang krusial dan utama dalam sebuah penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang akurat.

Teknik pengumpulan data mengacu pada metode atau prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh dan mengumpulkan data, seperti yang dinyatakan oleh Ridwan (2012:51).

Proses pengumpulan data yang sesuai dan tepat untuk rumusan masalah yang telah disebutkan dalam penelitian ini meliputi dua metodologi pengumpulan data, yaitu:

1. Penelitian Lapangan, penelitian dilakukan dengan cara terjun secara langsung ke instansi yang menjadi objek penelitian, data yang diperoleh sebagai besar hasil dari observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada pada staf bidang Akuntansi dan Pelaporan meliputi kepala bidang, kepala sub bidang akuntansi dan pelaporan, kepala bidang verifikasi dan beberapa staf.
2. Studi Pustaka, data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu dengan menelusuri dokumen seperti dokumen laporan keuangan , dokumen Peraturan Bupati Cilacap serta dokumen peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan penelitian.

3.4 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2010) mendefinisikan prosedur analisis data sebagai proses sistematis pengaturan dan pemeriksaan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Tahapan-tahapannya meliputi mengkategorikan materi, memecahnya menjadi komponen-komponen yang berbeda, mensintesis informasi, mengorganisasikan pola, memilih fitur-fitur

yang signifikan untuk dianalisis, dan menarik kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Menurut Wijaya (2018), keabsahan data merupakan faktor penting dalam penelitian ini. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data merupakan konsep yang dinamis dan rumit, ditandai dengan aspek-aspek yang tidak statis atau berulang. Keabsahan data dapat dipastikan dengan penerapan teknik triangulasi data setelah prosedur pengumpulan data selesai.

Triangulasi, seperti yang didefinisikan oleh Norman K Denkin dirujuk oleh Rahardjo (2012), adalah pemanfaatan beragam metodologi untuk menganalisis peristiwa yang saling berhubungan dari beberapa sudut pandang dan sudut pandang. Triangulasi mencakup beberapa komponen, yaitu:

1. Triangulasi metodologi melibatkan perbandingan informasi yang diperoleh melalui penggunaan metode wawancara, observasi, dan survei oleh para peneliti.
2. Triangulasi antar peneliti melibatkan penggunaan beberapa informan dalam pengumpulan dan analisis data, dengan syarat bahwa informan tersebut memiliki keahlian dan informasi yang berkaitan dengan penelitian yang sedang berlangsung.
3. Triangulasi sumber data melibatkan penggunaan berbagai sumber data dan metodologi, seperti wawancara, observasi, arsip, dokumen historis, catatan resmi, catatan pribadi, dan foto.
4. Triangulasi teori adalah metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memastikan keakuratan dan keandalan hasil akhir. Metode ini melibatkan perumusan informasi atau pernyataan tesis, yang kemudian dibandingkan dengan sudut pandang teori yang sesuai. Perbandingan ini membantu mencegah bias dalam kesimpulan yang diambil dari penelitian. Langkah ini tidak dapat disangkal menantang karena peneliti harus memiliki ketajaman yang terampil untuk menyandingkan temuan mereka dengan pendapat-pendapat tertentu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif untuk mengkaji data. Metode ini melibatkan pengumpulan, penyusunan, penafsiran, dan analisis data untuk memberikan informasi yang komprehensif untuk tujuan pemecahan

masalah. Untuk menilai keakuratan data yang termasuk dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kombinasi triangulasi dimana prosedur yang digunakan yaitu triangulasi metodologi dan triangulasi sumber data. Hal ini melibatkan peneliti untuk menggunakan berbagai teknik untuk mengumpulkan data. Ada beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam triangulasi metodologi ini, peneliti menggunakan tiga teknik untuk mendapatkan data dalam penelitian ini yaitu observasi, studi dokumentasi, dan wawancara.

BAB IV

PELAKSANAAN PROGRAM MAGANG

4.1 Profil Perusahaan

Setiap daerah memiliki lembaga pemerintahannya masing-masing, termasuk Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Cilacap yang secara khusus menangani pengelolaan keuangan dan aset daerah. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Cilacap merupakan organisasi pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengelola keuangan dan aset daerah secara langsung. BPPKAD memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik, serta visi dan tujuan.

4.1.1 Kedudukan BPPKAD

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) adalah badan pemerintah yang berfungsi sebagai badan pengatur untuk Kabupaten. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

4.1.2 Tugas dan Fungsi

1. Tugas

Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.

2. Fungsi

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Keuangan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Keuangan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Keuangan;
- d. Pelaksanaan ketatausahaan Badan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1.3 Visi dan Misi

Visi

“Optimalisasi Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah”

Misi

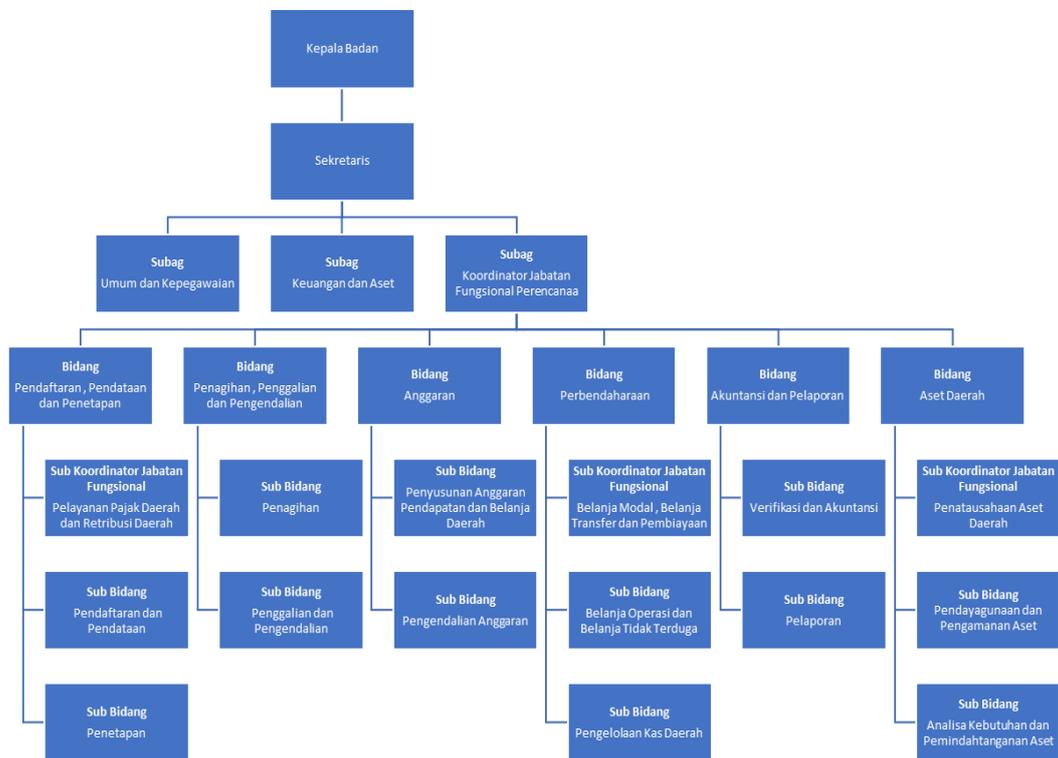
- 1) Peningkatan pendapatan daerah yang optimal.
- 2) Pengelolaan Keuangan yang efisien, efektif dan akuntabel.
- 3) Pengelolaan aset daerah yang berhasil guna dan berdaya guna.
- 4) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Gambar 4.1 Visi dan Misi

4.1.4 Susunan Organisasi

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD)

Kabupaten Cilacap memiliki susunan organisasi sebagai berikut :



Gambar 4.2 Susunan Organisasi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Cilacap

4.2 Rencana Program Magang

4.2.1 Tempat dan Waktu Kegiatan

Hari : Senin s.d Jumat

Waktu : 70 (Tujuh Puluh) hari kerja / 3 bulan

Tanggal : 4 September 2023 s.d 4 Desember 2023
 Tempat : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 (BPPKAD) Kabupaten Cilacap
 Alamat : Jl. Jendral Sudirman No.007 Sidakaya Dua, Sidakaya, Kecamatan
 Cilacap selatan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, 53212
 Bidang : Akuntansi dan Pelaporan

4.3 Data Peserta

Nama : Indah Aprilia Putri
 NIM : 20312419
 Program Studi : Akuntansi
 Fakultas : Bisnis dan Ekonomika
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia
 Semester : VII (Tujuh)
 No. Hp : 081326190848
 Email : 20312419@students.uii.ac.id

Tabel 4.1 Kegiatan Magang

	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan
Minggu I	4-8 September 2023	Pengenalan lingkungan dan budaya organisasi di BPPKAD Kabupaten Cilacap
Minggu II	11-15 September 2023	Bimbingan dan pengenalan materi dan tugas yang ada pada bidang akuntansi dan pelaporan
Minggu III	18-22 September 2023	Mengerjakan tugas yang diberikan dengan mentor, seperti mengolah data prosedur analitis antar akun laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Cilacap, mengolah data SP2D Pemerintah Kabupaten Cilacap. Selain itu juga membuat topik untuk penelitian laporan magang.
Minggu IV	25-29 September 2023	Mendiskusikan dan meminta persetujuan atas topik laporan magang yang sudah ditentukan kepada instansi terkait, setelah mendapat persetujuan penulis mulai meminta dokumen pendukung terkait penelitian yang akan penulis lakukan kepada instansi terkait.
Minggu V	02 – 06 Oktober	Menyusun proposal dengan topik yang sudah disetujui untuk laporan akhir magang.
Minggu VI	09 – 13 Oktober	Melakukan wawancara terhadap pihak pihak yang dianggap memiliki informasi yang memadai untuk keperluan penelitian, serta mulai melakukan pengambilan video pelaksanaan magang.

	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan
Minggu VII	16 -20 Oktober	Mulai melakukan finalisasi laporan akhir magang yang sudah di jalani.
Minggu VIII	23 – 27 Oktober	Mengecek dan memastikan bahwa semua dokumen dan data yang diperlukan untuk menunjang pembuatan laporan magang sudah didapatkan dan cukup.

BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini data dan informasi yang terkumpul dilakukan dengan metode wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2023 di BPPKAD Kabupaten Cilacap, tema dalam wawancara ini berkaitan dengan Aplikasi *Financial Management Information System* (FMIS) dimulai dari latar belakang, pengimplementasian, sumber daya manusia, sumber daya pendukung seperti infrastruktur dan sarana prasarana, serta kendala yang dihadapi dan upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, informan dalam wawancara ini adalah staf bidang Akuntansi dan Pelaporan sebagai berikut :

01. Kepala Bidang
02. Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan
03. Kepala Sub Bidang Verifikasi
04. Staf 1
05. Staf 2

5.1 Hasil Penelitian

Implementasi Aplikasi *Financial Management Information System* (FMIS)
Terhadap Pengelolaan Keuangan BPPKAD Kabupaten Cilacap.

Tabel 5.1 Pelaksanaan Implementasi Aplikasi *Financial Management Information System* (FMIS)

NO	TRIANGULASI		
	KODING	INFORMAN	SUMBER LAIN TEMA
1	Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh BPPKAD Kabupaten Cilacap yaitu membuat perda dan perbup pertanggungjawaban APBD meliputi penyusunan KUA dan PPAS, menyusun APBD perubahan Kabupaten Cilacap, melaksanakan Pencairan atas APBD Kabupaten Cilacap, selain	01, 02, 03	Peraturan / Regulasi terkait dengan penerapan sistem informasi pada pemerintahan daerah dan studi Dokumentasi Tugas BPPKAD

itu BPPKAD sesuai dengan tupoksinya BPPKAD bidang akuntansi dan pelaporan juga menyiapkan laporan keuangan pemerintah daerah yang nantinya akan diaudit oleh BPK, hal sesuai dengan **PERBUP Kabupaten Cilacap Nomor 167 Tahun 2020**.

Financial management information system (FMIS) merupakan aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan perencanaan, penatausahaan, penyusunan RKA DPA, pengesahan DPA pelaksanaan APBD dan penyusunan laporan keuangan seluruh kegiatan ini dilaksanakan menggunakan sistem informasi yang sudah disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap sesuai dengan **Permendagri Nomor 70 Tahun 2019**.

Aplikasi ini dibuat oleh dengan *web base* dengan tujuan untuk mempermudah akses akan hal ini bisa dikatakan FMIS ini sangat bergantung pada koneksi / jaringan internet serta server yang memadai. Tetapi dengan dirancangnya FMIS dengan sistem informasi *web base* memudahkan penggunaanya karena dapat diakses dimana saja, sistem aplikasi ini merupakan sistem yang dirancang oleh BPKP pusat sehingga cakupannya luas dan diakses oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi kota ataupun kabupaten, selain itu

01,02, 03

Peraturan /
Regulasi terkait
dengan
penerapan
sistem
informasi pada
pemerintahan
daerah dan
studi
Dokumentasi

Latar
Belakang
Aplikasi
*Financial
Management
Information
System*

penerapan sistem informasi ini juga tak lepas dari kendala kendala teknis.

BPPKAD merupakan organisasi pemerintah daerah yang melaksanakan belanja daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai unsur pengelola keuangan daerah, oleh karena itu fasilitas sarana dan prasarana yang disediakan oleh BPPKAD Kabupaten Cilacap sudah memadai, dengan sarana dan prasarana yang memadai membantu dalam penyediaan dan pengelolaan informasi karena pada FMIS ini memiliki alur yang terarah dan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun pada aplikasi yang digunakan yaitu aplikasi FMIS masih mendapati beberapa kendala dimana terkadang server *down* karena kendala jaringan, selain itu FMIS ini belum bisa menghasilkan laporan LRA LO dan Neraca bulanan, dan seringkali jurnal tidak terentri pada *system*.

01,02, 03,
04, 05

Studi
Dokumentasi

Implementasi
Aplikasi
*Financial
Management
Information
System*

Tabel 5.2 Kendala pengimplementasian Aplikasi *Financial Management Information System* (FMIS) terhadap peengelolaan keuangan pada BPPKAD Kabupaten Cilacap

NO	KODING	TRIANGULASI		
		INFORMAN	SUMBER LAIN	TEMA
1	SDM merupakan salah satu sumber daya utama dalam pengimplementasian aplikasi FMIS dimana bisa dikatakan SDM ini memiliki pengaruh yang besar dalam pengimplementasian / penggunaan aplikasi FMIS ini, selain itu Sumber daya penunjang yang digunakan yaitu aplikasi FMIS yang merupakan sistem informasi <i>web base</i> dan masih masih terus dalam proses pengembangan pastinya akan mendapati beberapa kendala teknis dalam proses pembuatan laporan keuangan serta sering terjadinya error dalam pembuatan jurnal. Aplikasi FMIS ini tidak bisa lepas dari jaringan internet untuk mengaksesnya, aplikasi FMIS ini dapat diakses oleh seluruh SKPD pada Kabupaten Cilacap baik badan/dinas kecamatan dan BLUD (Puskesmas dan RSUD)	01, 02, 03, 04,05	Studi Dokumentasi	Sumber daya manusia dan Sumber daya pendukung
2	Komunikasi antara staf pada BPPKD terkait dengan pengimplementasian FMIS sudah dilaksanakan dengan cukup baik, selain itu jika terdapat kendala pada aplikasi FMIS pihak BPPKAD langsung mengkomunikasikan dengan pihak pembuat aplikasi ini yaitu BPKP dimana sejauh ini kendala yang dihadapi sudah mendapatkan respon yang cukup baik oleh BPKP, BPKP selaku pembuat aplikasi juga selalu memberikan informasi secara	01, 02,03,04, 05	Studi Dokumentasi	Komunikasi antar pengguna aplikasi serta pemerintah

lengkap jika terjadi pengembangan aplikasi ataupun adanya perubahan kebijakan.

Tabel 5.3 Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala pengimplementasian Aplikasi *Financial Management Information System* (FMIS) terhadap pengelolaan keuangan pada BPPKAD Kabupaten Cilacap

NO	TRIANGULASI			TEMA
	KODING	INFORMAN	SUMBER LAIN	
	Menerapkan sistem informasi untuk menunjang seluruh kegiatan yang ada seperti FMIS dan memberikan pelatihan secara rutin dan terus meng update ketika ada pembaruan sistem ataupun kebijakan yang ada.	01, 02, 03, 04, 05	Studi Dokumentasi	Upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi.

5.2 Pembahasan

5.2.1 Analisis Implementasi Aplikasi *Financial Management Information System* (FMIS)

Sistem informasi pemerintah merupakan pengembangan dari serangkaian sistem yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak dan pelaksananya yang bekerja dan saling mendukung dalam pengelolaan data dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat (Nataniel et al.,2009). Pada era yang didominasi oleh kemajuan teknologi informasi, pengimplementasian sistem informasi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dan proses akuntansi organisasi publik lebih efisien, transparan dan akuntabel, hal ini pada BPPKAD Kabupaten Cilacap didukung dengan adanya Aplikasi sistem informasi dimana dengan adanya sistem ini diharapkan dapat menunjang seluruh aktivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Aplikasi Sistem informasi yang digunakan oleh BPPKAD Kabupaten Cilacap yaitu aplikasi *Financial Management Information System* (FMIS) aplikasi ini digunakan

untuk pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, penganggaran, penyusunan RKA DPA, pengesahan DPA, pelaksanaan APBD, penyusunan Laporan Keuangan Daerah seperti Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, neraca dan lain sebagainya serta Laporan Pertanggungjawaban, aplikasi FMIS Ini digunakan oleh seluruh S KPD baik badan/dinas kecamatan dan BLUD (Puskesmas dan RSUD). Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap khususnya pada BPPKAD sebelum penggunaan FMIS BPPKAD menggunakan SIMDA sejak tahun 2014 dengan SIMDA yang berbasis desktop terhitung sejak 2014 hingga 2022.

Sejak awal penggunaan SIMDA hingga tahun 2022 SIMDA yang berbasis *desktop* terus dikembangkan hingga sekarang berubah menjadi FMIS dan menjadi *web base*, namun pada saat masa peralihan dari SIMDA ke FMIS menurut informan tahapan pengelolaan keuangannya yang dimulai dari penatausahaan hingga pertanggungjawaban hampir sama alur pengoperasiannya tetapi tetap ada penyesuaian dan perubahan sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan. Sebagai contoh berdasar dari pernyataan yang diberikan informan implementasi aplikasi FMIS ini jika dilihat dari fasilitas yang disediakan oleh aplikasi ini sudah sesuai dengan salah satu tugas dari BPPKAD yang diatur dalam PERBUP Kabupaten Cilacap Nomor 167 Tahun 2020 yaitu membuat laporan keuangan, dimana salah satu output yang di keluarkan oleh FMIS adalah laporan keuangan baik Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca hingga Laporan keuangan akhir tahun yang nantinya akan diaudit oleh BPK. Informan juga mengatakan bahwa dengan adanya aplikasi FMIS ini seluruh kegiatan perencanaan dan penatausahaan keuangan daerah dapat dilakukan secara optimal menggunakan aplikasi FMIS walaupun memang belum sepenuhnya optimal karena masih ada beberapa kendala yang dalam aplikasi seperti masih sering terjadi kesalahan dalam pembuatan jurnal, dimana jurnal yang seharusnya tidak terbentuk mungkin karena ada salah entri tetapi sudah di unposting yang membuat jurnal terbentuk atau sebaliknya jurnal tidak terbentuk padahal data sudah di entri dengan benar akibat dari hal ini penerbitan laporan keuangan akan terhambat.

Berdasarkan pernyataan yang diberikan informan dapat disimpulkan bahwa implementasi aplikasi FMIS ini sudah sesuai dengan kebijakan yang berlaku,

aplikasi FMIS merupakan aplikasi utama yang digunakan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap untuk menunjang dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 setiap pemerintahan daerah wajib menyediakan informasi pemerintah dalam bentuk sistem informasi dalam ini informan mengatakan bahwa sistem informasi yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada BPPKAD yaitu aplikasi FMIS ini dimana isi segala informasi keuangan daerah Kabupaten Cilacap sudah tersedia pada aplikasi tersebut. Aplikasi FMIS ini dibuat dalam bentuk *underweb / web base* supaya aplikasi mudah untuk diakses dimana saja, aplikasi FMIS ini juga masih terus dalam pengembangan dan selalu melakukan penyempurnaan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Dengan demikian untuk efektivitas penggunaan aplikasi sistem informasi FMIS ini sudah dapat dikatakan cukup efektif dan efisien dengan segala perkembangan yang terus dilakukan agar aplikasi dapat menunjang segala kegiatan dengan optimal.

Hasil analisis yang sudah dilakukan melalui wawancara, observasi serta studi dokumentasi peneliti dengan para informan pada BPPKAD Kabupaten Cilacap, dalam masa pengimplementasian FMIS sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku, namun terdapat beberapa kendala dalam pengimplementasiannya, dimana kendala yang dialami terkait dengan pembuatan jurnal otomatis dalam aplikasi FMIS ini yang sedikit sensitif karena terkadang ada jurnal yang seharusnya tidak terbentuk mungkin karena ada salah entri tetapi sudah di unposting tetapi jurnal malah terbentuk atau sebaliknya jurnal tidak terbentuk padahal data sudah di entri dengan benar akibat dari hal ini penerbitan laporan keuangan akan terhambat. Terkait dengan kendala ini dari pemerintah pusat khususnya pembuat aplikasi ini yaitu BPKP sudah ada pengembangan pada FMIS yaitu dengan adanya menu perbaikan, artinya dari informasi yang didapatkan dari informan pengoprasian aplikasi FMIS ini dapat dilakukan secara optimal tetapi belum maksimal karena terdapat kendala seperti yang sudah dijelaskan terkait pembuatan jurnal otomatis yang terkadang masih ada jurnal yang tidak mau terbentuk.

Sejalan dengan penelitian sebelumnya dimana terjadinya transisi pada perangkat pendukung kegiatan pada BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara yaitu dari aplikasi SIMDA ke FMIS, saat ini aplikasi FMIS sudah cukup optimal dalam

mendukung kegiatan pada BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara, memang pada tahap awal pengoperasian FMIS ini menghadapi beberapa hambatan diantaranya muncul beberapa masalah seperti kekurangan fitur pada beberapa menu, sulitnya akses jaringan yang menyebabkan terjadinya error pada aplikasi, dan aplikasi sering *down* atau tidak bisa diakses karena kesalahan server ,untuk mengatasi hal tersebut BAPENDA aktif untuk mengikuti perkembangan penyempurnaan aplikasi FMIS (Tumanduk et al., 2022).

5.2.2 Analisis Kendala Pengimplementasian Aplikasi *Financial Management Information System* (FMIS)

PERMENDAGRI Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 menyebabkan adanya modifikasi dalam pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi di BPPKAD Kabupaten Cilacap. Setelah dilakukan penerapan metode teori model implementasi George C Edward III, terlihat adanya hambatan pada domain variabel komunikasi dan sumber daya.

Menurut informan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan aplikasi FMIS untuk pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan belanja daerah di BPPKAD Kabupaten Cilacap. Analisis dan pembahasan berikut menguraikan kendala-kendala yaitu:

1. Kendala Komunikasi

Faktor komunikasi pada Implementasi Aplikasi *Financial Management Information System* (FMIS) pada BPPKAD Kabupaten Cilacap tidak mengalami kendala yang signifikan, dimana dalam berkomunikasi baik antar staf BPPKAD, bidang-bidang pada BPPKAD, hingga antar SKPD berjalan dengan baik, namun pada saat pengimplementasian Aplikasi FMIS tetap memerlukan komunikasi yang lebih baik untuk beberapa hal terkait dengan kendala yang dihadapi terutama jika sudah berkaitan dengan laporan keuangan seperti jurnal yang mungkin ada kesalahan atau tidak terposting pada sistem untuk segera dikomunikasikan karena melihat dari pernyataan yang diberikan oleh informan ada beberapa kendala terkait jurnal yang mengalami kesalahan tetapi tidak segera dikomunikasikan dan menemukan solusi yang

mengakibatkan ada keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan selanjutnya.

Selain penjelasan diatas hal serupa juga dijelaskan pada beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Sari Novita D, 2022) menjelaskan bahwa dalam pengimplementasian sistem informasi pada suatu pemerintah daerah perlu untuk ada pengarahan dan komunikasi yang baik, karena sistem informasi yang digunakan oleh pemerintah daerah tetap perlu ada perbaikan dan pengembangan secara terus menerus untuk mengatasi kendala yang bermunculan.

2. Kendala Sumber Daya

Hasil analisis yang sudah dilakukan melalui wawancara, observasi serta studi dokumentasi peneliti dengan para informan pada BPPKAD Kabupaten Cilacap, untuk kinerja pelayanan dibidang keuangan oleh Aplikasi FMIS didukung oleh sumber daya. Sumber daya tersebut adalah sumber daya manusia yakni satuan pengelola keuangan dan fasilitas penunjang nya yakni Aplikasi FMIS yang saat ini digunakan masih perlu ditingkatkan baik dari segi teknologi maupun kebijakan yang berlaku.

Edward, G. C. (1984) menegaskan bahwa ketentuan dan aturan yang jelas, konsisten, tepat, dan akurat merupakan hal yang krusial bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Namun, jika para pelaksana kebijakan tidak memiliki sumber daya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan mereka secara efektif, maka implementasi tersebut pasti akan gagal. Sumber daya ini mencakup berbagai aspek, termasuk sumber daya manusia dan sumber daya pendukung seperti fasilitas informasi. Berikut penjelasan dan analisis mengenai kendala yang terkait dengan sumber daya :

2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan peran utama dalam pengimplementasian kebijakan dan Aplikasi FMIS berhasil atau gagal nya kebijakan untuk diterapkan itu bisa dilihat dari sumber daya manusianya apakah memadai atau tidak. Berdasarkan pernyataan dari beberapa informan penelitian sebagian besar menyatakan untuk sumber daya manusia pada

BPPKAD Kabupaten Cilacap sudah cukup baik dan memadai dalam mengimplementasikan kegiatan pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan aplikasi FMIS. Hal ini berdasar pada pernyataan yang diberikan informan, sejak awal tahun 2023 pemerintah daerah Kabupaten Cilacap khususnya pada BPPKAD Kabupaten Cilacap sudah menggunakan Aplikasi FMIS dimana dalam pelaksanaannya sudah optimal, tetapi terdapat kendala terkait terbatasnya *skill* dan pemahaman teknologi pada beberapa pengguna aplikasi.

Selain penjelasan diatas hal serupa juga dijelaskan pada beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Balqis et al., (2021) menyatakan bahwa staff atau SDM merupakan aktor utama dalam pengimplementasian kebijakan oleh karena itu perlu adanya *upgrade skill* untuk menghindari adanya *staff* yang tidak paham dengan sistem yang digunakan oleh pemerintah daerah.

2.2 Sumber Daya Penunjang

Sarana dan prasarana yang disediakan oleh BPPKAD Kabupaten Cilacap sudah memadai dan cukup lengkap namun masih perlu ada peningkatan dalam beberapa hal terutama untuk aplikasi *under web / web base* yaitu aplikasi FMIS, untuk meningkatkan kapasitas pada *software* yang digunakan dan meningkatkan kualitas jaringan komputer dan komunikasi sehingga tidak terjadi *server down* karena banyaknya yang akses aplikasi ini.

Selain penjelasan diatas hal serupa juga dijelaskan pada beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tumanduk et al., (2022) terjadinya perubahan dari SIMDA ke FMIS mengakibatkan pada saat awal penggunaan aplikasi FMIS belum dilaksanakan secara maksimal, dimana masih terjadi beberapa kendala seperti adanya perbedaan letak menu, lalu kendala jaringan yang terkadang sulit masuk ke server, hal ini mengakibatkan terhambatnya proses pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan seperti LRA pada UPTB.

5.2.3 Analisis upaya mengatasi kendala Pengimplementasian Aplikasi *Financial Management Information System* (FMIS)

1. Upaya mengatasi kendala komunikasi

Pengimplementasian pengelolaan keuangan menggunakan FMIS pada BPPKAD Kabupaten Cilacap dalam hal ini jika terjadi kesalahan posting atau ada jurnal yang tidak terposting ataupun sebaliknya untuk segera dikomunikasikan langsung dengan pihak yang memiliki tanggung jawab akan hal itu yaitu bidang akuntansi dan pelaporan atau jika terjadi kendala lain bisa langsung dikomunikasikan dengan fungsi pengelolaan keuangan terkait yang dapat membantu untuk menyelesaikan kendala atau masalah yang dihadapi.

2. Upaya Mengatasi kendala sumber daya

Upaya mengatasi sumber daya dalam hal ini adalah fasilitas penunjang kinerja pengelolaan keuangan melalui aplikasi FMIS dimana pada BPPKAD menggunakan jaringan dalam kapasitas yang maksimal untuk kebutuhan pelayanan di bidang keuangan.

Terkait dengan kendala sumber daya manusia, terbatasnya *skill* dan pemahaman teknologi pada beberapa pengguna aplikasi, upaya yang dilakukan yaitu dengan terus melakukan pengembangan dan *upgrade skill* baik dari sisi teknologi dan kebijakannya dengan cara mengadakan pelatihan pada BPPKAD sendiri pelatihan ini sering dikenal dengan BIMTEK yang selalu diadakan secara rutin untuk meningkatkan *skill* dan pemahaman SDM nya.

Selain itu BPPKAD Kabupaten Cilacap dalam hal Pembinaan Keuangan dalam rangka peningkatan kinerja pengelolaan FMIS dilakukan upaya untuk mengatasi kendala-kendala teknis dengan melakukan Bimbingan teknis secara rutin, BPPKAD Kabupaten Cilacap selalu mengikuti perkembangan dalam penyempurnaan dari aplikasi FMIS dengan melakukan pendampingan kepada entitas akuntansi serta meningkatkan komunikasi, koordinasi dan komunikasi secara efektif kepada seluruh SKPD penggunaan FMIS.

5.3 Kesimpulan

1. Implementasi Aplikasi *Finacial Management Information System* (FMIS) pada BPPKAD Kabupaten Cilacap sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Cilacap, segala kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh BPPKAD dalam pengelolaan keuangan seluruhnya sudah memanfaatkan sistem informasi dalam hal ini yaitu Aplikasi *Financial Management Information System*, contohnya untuk pembuatan laporan keuangan seluruhnya

sudah bisa dilakukan pada Aplikasi *Financial Management Information System* (FMIS).

2. Pada pegimplementasian Aplikasi *Financial Management Information System* (FMIS) tidak terlepas dari kendala yang dihadapi, beberapa kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :
 - a. Kendala komunikasi, berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kendala komunikasi tidak terlalu signifikan hanya saja perlunya kesadaran para pengguna aplikasi ini untuk segera mengkomunikasikan kepada pihak terkait ketika terjadi kendala.
 - b. Kendala sumber daya, sumber daya penunjang pada BPPKAD Kabupaten Cilacap sudah cukup memadai dilihat dari segi sarana dan prasarana yang disediakan, namun ada beberapa sumber daya penunjang seperti peningkatan *software* dan peningkatan kualitas jaringan untuk memudahkan pada penggunaan aplikasi.
3. Upaya untuk mengatasi kendala dalam pengimplementasian Aplikasi *Financial Management Information System* (FMIS), upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala komunikasi yaitu dengan segera mengkomunikasikan dengan pihak terkait jika terjadi kesalahan posting atau lain sebagainya khususnya dengan bidang Akuntansi dan Pelaporan, lalu terkait dengan kendala sumber daya manusianya yaitu dengan mengadakan BIMTEK secara rutin guna selalu mendapatkan informasi jika terjadi perbaikan dan pengembangan aplikasi, lalu untuk kendala sumber daya penunjang BPPKAD perlu meningkatkan kualitas server dan jaringan dengan maksimal, agar segala aktivitas pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan dengan tepat waktu.

5.4 Saran

Guna meningkatkan pengelolaan keuangan pada BPPKAD Kabupaten Cilacap sebagai entitas dengan tugas dan fungsi mengelola keuangan dan aset daerah diharapkan :

1. Pemerintah Kabupaten Cilacap dan BPPKAD perlu melakukan pengembangan lebih lanjut terkait Aplikasi *Financial Management Information System* (FMIS)

2. Dalam pengembangan Aplikasi BPPKAD dan pembuat aplikasi perlu lebih melakukan penekanan perbaikan sistem pada menu jurnal supaya tidak terjadi hal hal seperti munculnya jurnal jurnal yang tidak diinginkan.
3. Pemerintah Kabupaten Cilacap dan BPPKAD perlu meningkatkan server dan jaringan karena sistem sering sekali terhenti apabila kualitas jaringan rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bupati Cilacap. (2020). *Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 167 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan da. Cilacap: Pemerintah Daerah Cilacap.*
- Edward, G. C. (1984). *Public Policy Implementation*. London: Jai Press.
- Inzany, R., Yulivan, I., Saputro, G. E., Suwito, S., Purwantoro, S. A., & Prihantoro, K. (2022). Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam Perencanaan Pendapatan dan Belanja Daerah. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3573–3588.
- Kemendagri RI. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kemendagri RI.
- Kemenkeu RI. (2001). *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141 / KMK.07 / 2001 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kinasih, S. (2022). *Laporan Magang pada Kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Mendagri RI. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI.
- Nasution, M. I., & Nurwani, M. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 109–116.
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy: Dinamika kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan* (6th ed.). Jakarta: Gramedia.

- Pemerintah RI. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Pemerintah RI.
- Pemerintah RI. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Wilayah*. Jakarta: Pemerintah RI.
- Prastyo, I. M. (2023). *Peran Sistem Informasi Manajemen Daerah Pada Ketepatan Informasi Laporan Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pati*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.
- Presiden RI. (2018). *Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)*. Jakarta: Pemerintah RI.
- Rahardjo, M. (2012). *Mengukur Kualitas Penelitian Kualitatif*. Malang: UIN Malang.
- Ridwan, S. (2012). *Pengantar Statistika untuk Penelitian: Pendidikan, Sosial, Komunikasi, Ekonomi dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Rumondor, M. D., Tinangon, J. J., & Wokas, H. R. N. (2023). Analisis Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Dalam Pelaksanaan Belanja Daerah Pada Bkad Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing " Goodwill"*, 14(1), 65–86.
- mmfqq
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, P. D. (2010). *Metode Penelitian Bisnis (15th ed.)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sujarweni, W. (2019). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Tampang, E., Tinangon, J. J., & Warongan, J. D. L. (2022). Analisis Pengelolaan

Keuangan Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara Analysis Of Regional Financial Management at the Manpower and Transmigration Office of North Sulawesi Province. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(1), 61–70.

Tumanduk, A. V, Gamaliel, H., & Kapojos, P. M. (2022). Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 17(4), 214–224.

Usman, N. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo.

Widodo, J. (2007). *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

Wijaya, H. (2018). *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*. Jakarta: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Curriculum Vitae Indah Aprilia Putri

INDAH APRILIA PUTRI

081326190848 | apriliaputriindah@gmail.com | www.linkedin.com/in/IndahApriliaPutri
Cilacap , Jawa Tengah

I am 7th semester student majoring in Accounting at Universitas Islam Indonesia with interest in the field of **accounting, tax, audit, and finance**. I am an effective communicator with strong leadership skills. A strong leader who works well and always looks for opportunities to grow. I am ready to take on new challenges in a dynamic environment.

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - Cilacap, Indonesia **Sept 2023 - Present**
Reporting & Accounting (Intern)

HTC Training & Consulting Yogyakarta - Yogyakarta , Indonesia **Jan - Apr 2023**
Brevet A&B Tax Training

Training and examinations on Income Tax Article 22, Income Tax Article 23, Tax Article 21, Income Tax Article 4(2), Personal Income Tax, Corporate Income Tax, Value Added Tax (VAT), Luxury Goods Sales Tax (PPnBM), Land and Building Tax (PBB), Acquisition of Land and Building Rights Tax (BPHTB), Customs Duty (BM), Tax Accounting, and Tax Identification Number Form B (KUP B)

HTC Training & Consulting Yogyakarta - Yogyakarta , Indonesia **May 2023**
Tax Consultant

- Doing the preparation of the SPT (PPN and PPH)
- Implement tax computer application (E-SPT and E Invoice).

EDUCATION LEVEL

Universitas Islam Indonesia **2020 - Present**
Bachelor's Degree in Accounting Studies

ORGANIZATIONAL EXPERIENCE

Badan Audit Kemahasiswaan Universitas Islam Indonesia - Yogyakarta, Indonesia **March 2022- March 2023**
Human Resources Development Staff

- Managing Development for Badan Audit Kemahasiswaan members.
- Managing recruitment process.
- Managing reward process for Badan Audit Kemahasiswaan members.
- Conduct gathering for Badan Audit Kemahasiswaan members

Others

Soft Skills : team work , problem solving , effective communication

Hard Skills : excel , risk management , audit , taxes and tax reporting

Lampiran 2. Surat keterangan selesai magang



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
 Jalan Jenderal Sudirman Nomor 7 Telepon (0282) 533461-521304, Faksimile 0282 - 521304
CILACAP Kode Pos 53212

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 400.14.5.4/3438/40

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WARSONO, S.H., M.Hum.
 Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : INDAH APRILIA PUTRI
 Tempat Tanggal Lahir : Cilacap, 16 April 2002
 NIM : 20312419
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia
 Fakultas : Bisnis dan Ekonomika
 Pogram Studi : S1 Akuntansi
 Alamat : Jalan Srandil RT. 01 RW. 04 Desa Glempang Pasir Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap

telah melaksanakan Magang/Kerja Praktik di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap, terhitung mulai tanggal 4 September s.d 4 Desember 2023.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cilacap, 5 Desember 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN
 PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN CILACAP

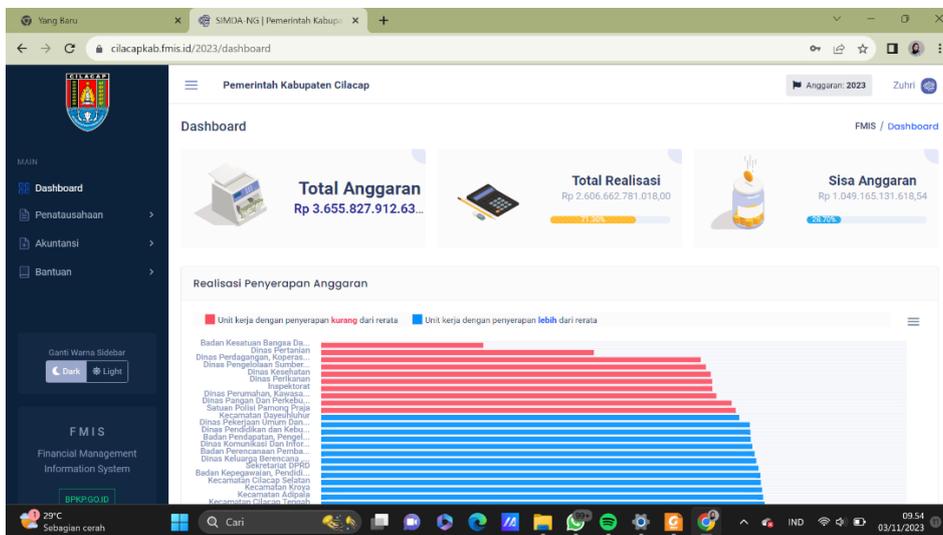
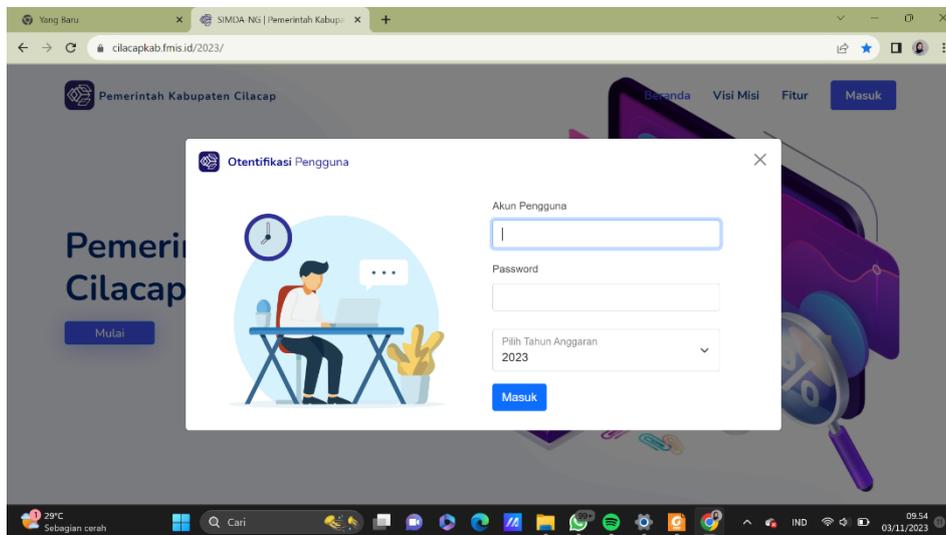


WARSONO, S.H., M.Hum.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650108 198903 1 009

Lampiran 3. Buku peraturan bupati cilacap



Lampiran 4. Tampilan FMIS



Lampiran 5. Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran BLUD

KABUPATEN CILACAP
SURAT PERTANGGUNGJAWABAN
BENDAHARA PENGELUARAN BLUD
(SPI BELANJA - ADMINISTRATIF - FUNGSIONAL)
MASA ANGGARAN DEFINITIF

Instansi : PUSKESMAS KAWUNGANTEN
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : 196810031992031005 / EDY NUGROHO BASUKI, S.KM
Tahun Anggaran : 2023
Bulan : Agustus

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran		SPI - LS GAJI		SPI - LS BARANG & JASA		SPI - UPG/UTU		Jumlah SPI (LS-UPG/UTU)	Sisa Pagu Anggaran
		s.d bulan lalu	s.d bulan ini	s.d bulan lalu	s.d bulan ini	s.d bulan lalu	s.d bulan ini	s.d bulan lalu	s.d bulan ini		
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	96.840.000	-	-	-	-	-	-	-	96.840.000	22.908.716
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	75.266.400	-	-	-	-	-	-	-	75.266.400	10.858.047
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPK Kecamatan	12.813.600	-	-	-	-	-	-	-	12.813.600	6.060.000
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keagamaan	6.060.000	-	-	-	-	-	-	-	6.060.000	2.700.000
5.1.02.99.99.9999	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa	2.700.000	-	-	-	-	-	-	-	2.700.000	-
	Belanja Barang dan Jasa BLUD	3.954.960.000	-	-	-	-	-	-	-	3.954.960.000	40.505.042
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	57.200.000	-	-	-	-	-	-	-	57.200.000	16.694.958
	Belanja Bahan-bahan Tabung Pemadam Kebakaran	4.250.000	-	-	-	-	-	-	-	4.250.000	4.250.000
	Belanja Bahan-bahan Tabung Gas	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000	19.177.500
	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	34.510.000	-	-	-	-	-	-	-	34.510.000	29.990.000
	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kesehatan	8.400.000	-	-	-	-	-	-	-	8.400.000	8.400.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	73.846.080	-	-	-	-	-	-	-	73.846.080	30.960.330
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	77.759.500	-	-	-	-	-	-	-	77.759.500	19.940.300
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Komputer	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000	3.000.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan	15.280.000	-	-	-	-	-	-	-	15.280.000	6.900.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	53.861.500	-	-	-	-	-	-	-	53.861.500	40.758.500
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	19.986.000	-	-	-	-	-	-	-	19.986.000	4.281.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	33.450.000	-	-	-	-	-	-	-	33.450.000	26.185.004	
Belanja Obat-Obatan-Obat	124.207.007	-	-	-	-	-	-	-	124.207.007	83.762.171	
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	181.959.913	-	-	-	-	-	-	-	181.959.913	68.840.913	
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	180.000.000	-	-	-	-	-	-	-	180.000.000	61.065.000	
Belanja Pakalan Dinas Harian (PDH)	28.800.000	-	-	-	-	-	-	-	28.800.000	7.200.000	
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2.530.000.000	-	-	-	-	-	-	-	2.530.000.000	531.213.330	
Belanja jasa Tenaga Kebersihan	105.000.000	-	-	-	-	-	-	-	105.000.000	42.000.000	

SIP-BLUD v.1.2021.01 beta 2021 SPI C2 Fungsional - 1

Lampiran 6. SP2BP

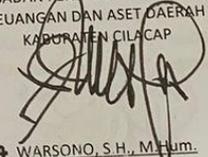
SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN (SP2BP) BLUD

 PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP	SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN (SP2BP) BLUD	
Nomor : 900/012099 4/16.0 Tanggal : 5 Oktober 2023 Kode BLUD : 1.02.01.02.01.22 Nama BLUD : PUSKESMAS KARANGPUCUNG II	Nama BUD : BPPKAD KABUPATEN CILACAP Tanggal : Oktober 2023 Nomor : 900/ /40 Tahun Anggaran : 2023	
Telah disahkan pendapatan dan belanja bulan September sejumlah :		
Saldo Awal	Rp. 326.535.830,00	
Pendapatan	Rp. 133.486.746,00	
Belanja	Rp. 132.141.613,00	
Saldo Akhir	Rp. 327.880.963,00	
Telah disahkan pembiayaan bulan September sejumlah :		
Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0,00	
Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00	
Catatan :		
Saldo Akhir Kas BLUD Sebesar	Rp 327.880.963,00	terdiri dari :
a. Tunai Bendahara Pengeluaran	Rp 682.878,00	
b. Saldo Bank (Rekening BLUD)	Rp 324.698.085,00	
c. Saldo Bank (Rek. Bend. Pengeluaran)	Rp 2.500.000,00	
d. Surat Berharga	Rp 0,00	
	<u>Rp 327.880.963,00</u>	
CILACAP, Oktober 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN CILACAP		
<u>WARSONO, S.H., M.Hum.</u> Pembina Utama Muda NIP. 19650108 198903 1 009		

Lampiran 7. SPB BOK Puskesmas

02.

**SURAT PENGESAHAN BELANJA (SPB)
PERIODE SEPTEMBER 2023
BOK PUSKESMAS**

 PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP	<p style="text-align: center;">SURAT PENGESAHAN BELANJA DINAS KESEHATAN</p> <p>Nama BUD : BPPKAD KABUPATEN CILACAP Tanggal : 09 Oktober 2023 Nomor : 900 / 2895 / 40 Tahun Anggaran : 2023</p>																					
<p>Nomor SP2B : 900 / 012.0957 / 16.0 Tanggal : 5 Oktober 2023 Kode Organisasi : 1.02.01.002</p>																						
<p>Telah disahkan belanja dana BOK Puskesmas Adipala II bulan September 2023 sejumlah :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Saldo Awal</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">: Rp.</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">8.287.464,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Saldo akhir bulan sebelumnya (B1)</td> <td style="text-align: center;">: Rp.</td> <td style="text-align: right;">8.287.464,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Penerimaan</td> <td style="text-align: center;">: Rp.</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>2. Total Belanja</td> <td style="text-align: center;">: Rp.</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Belanja Pegawai</td> <td style="text-align: center;">: Rp.</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Belanja Barang/Jasa</td> <td style="text-align: center;">: Rp.</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>3. Saldo Akhir</td> <td style="text-align: center;">: Rp.</td> <td style="text-align: right;">8.287.464,00</td> </tr> </table>		1. Saldo Awal	: Rp.	8.287.464,00	a. Saldo akhir bulan sebelumnya (B1)	: Rp.	8.287.464,00	b. Penerimaan	: Rp.	-	2. Total Belanja	: Rp.	-	a. Belanja Pegawai	: Rp.	-	b. Belanja Barang/Jasa	: Rp.	-	3. Saldo Akhir	: Rp.	8.287.464,00
1. Saldo Awal	: Rp.	8.287.464,00																				
a. Saldo akhir bulan sebelumnya (B1)	: Rp.	8.287.464,00																				
b. Penerimaan	: Rp.	-																				
2. Total Belanja	: Rp.	-																				
a. Belanja Pegawai	: Rp.	-																				
b. Belanja Barang/Jasa	: Rp.	-																				
3. Saldo Akhir	: Rp.	8.287.464,00																				
<p>Gilacap, 09 Oktober 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN CILACAP  WARSONO, S.H., M.Pum. Pembina Utama Muda NIP. 19650108 198903 1 009</p>																						

Lampiran 9. Rincian Saldo Buku Besar

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
CAP
202

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
SALDO BUKU BESAR
Periode 01 Januari 2023 s.d 30 Juni 2023

SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan
Unit : 1-02.0-00.0-00.01.018 Puskesmas Jeruklegi I
Sub Unit : 1-02.0-00.0-00.01.018.0 Puskesmas Jeruklegi I

KODE REKENING	URAIAN	DEBIT	KREDIT
1.3.1.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	5.483.125.058,00	0,00
1.3.2.01.03.0004	Electric Generating Set	140.900.000,00	0,00
1.3.2.01.03.0005	Pompa	2.610.000,00	0,00
1.3.2.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	30.000.000,00	0,00
1.3.2.02.01.0006	Kendaraan Bermotor Khusus	463.100.000,00	0,00
1.3.2.03.02.0001	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	1.220.000,00	0,00
1.3.2.03.03.0009	Alat Ukur Lain-Lain	7.243.420,00	0,00
1.3.2.03.03.0010	Alat Timbangan/Biaya	4.222.500,00	0,00
1.3.2.04.01.0002	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	600.000,00	0,00
1.3.2.05.01.0004	Alat Penyimpan Perengkapan Kantor	166.908.765,00	0,00
1.3.2.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	55.760.000,00	0,00
1.3.2.05.02.0001	Mebel	386.290.597,00	0,00
1.3.2.05.02.0004	Alat Pendingin	124.620.853,00	0,00
1.3.2.05.02.0005	Alat Dapur	10.744.670,00	0,00
1.3.2.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	87.987.356,00	0,00
1.3.2.05.02.0007	Alat Pemadam Kebakaran	12.568.504,00	0,00
1.3.2.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	9.600.000,00	0,00
1.3.2.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	73.940.000,00	0,00
1.3.2.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	5.870.000,00	0,00
1.3.2.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	550.000,00	0,00
1.3.2.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	11.775.000,00	0,00
1.3.2.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	349.900.742,00	0,00
1.3.2.07.01.0002	Alat Kedokteran Gigi	133.446.766,00	0,00
1.3.2.07.01.0003	Alat Kedokteran Keluarga Berencana	60.750.980,00	0,00
1.3.2.07.01.0004	Alat Kedokteran Bedah	21.100.000,00	0,00
1.3.2.07.01.0005	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	233.887.549,00	0,00
1.3.2.07.01.0006	Alat Kedokteran THT	6.494.090,00	0,00
1.3.2.07.01.0007	Alat Kedokteran Mata	712.432,00	0,00
1.3.2.07.01.0008	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	37.441.856,00	0,00
1.3.2.07.01.0010	Alat Kedokteran Anak	45.435.280,00	0,00
1.3.2.07.01.0011	Alat Kedokteran Poliklinik	2.676.000,00	0,00
1.3.2.07.01.0012	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	6.804.101,00	0,00
1.3.2.07.02.0003	Alat Kesehatan Kepolisian	9.949.400,00	0,00
1.3.2.07.02.0005	Alat Kesehatan Umum Lainnya	34.663.755,00	0,00
1.3.2.08.01.0001	Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	56.381.356,00	0,00
1.3.2.08.01.0006	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	2.298.928,00	0,00
1.3.2.08.01.0011	Alat Laboratorium Umum	118.777.069,00	0,00
1.3.2.08.01.0012	Alat Laboratorium Mikrobiologi	579.700,00	0,00
1.3.2.08.01.0014	Alat Laboratorium Patologi	142.992.192,00	0,00
1.3.2.08.01.0015	Alat Laboratorium Imunologi	11.686.540,00	0,00
1.3.2.08.01.0016	Alat Laboratorium Hematologi	22.000.000,00	0,00
1.3.2.08.01.0018	Alat Laboratorium Makanan	2.100.000,00	0,00
1.3.2.08.01.0019	Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	29.340.000,00	0,00
1.3.2.08.01.0055	Alat Peraga PAUD/TK	229.000.000,00	0,00
1.3.2.08.03.0003	Measuring/Testing Device	1.950.000,00	0,00
1.3.2.08.04.0006	Laboratorium Lingkungan	9.844.200,00	0,00
1.3.2.08.07.0004	Personal Computer	7.827.995,00	0,00
1.3.2.10.01.0002	Peralatan Mini Computer	6.393.810,00	0,00
1.3.2.10.02.0002	Peralatan Personal Computer	281.093.700,00	0,00
1.3.2.10.02.0004	Peralatan Jaringan	14.216.000,00	0,00
1.3.2.15.03.0002	Alat Pendukung Pencarian	61.265.325,00	0,00
1.3.2.17.01.0020	Solid Material Handling Equipment	11.550.000,00	0,00
1.3.2.19.01.0002	Peralatan Permainan	1.750.000,00	0,00
1.3.3.01.01.0006	Bangunan Kesehatan	3.962.700,00	0,00
1.3.3.01.01.0037	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	5.000.000,00	0,00
1.3.3.01.02.0003	Rumah Negara Golongan III	4.391.261.973,00	0,00
		99.765.000,00	0,00
		25.200.000,00	0,00

Printed By SIMDA-NG | 1/3

Lampiran 10. Lembar Pertanggungjawaban Fungsional

PEMERINTAH KABUPATEN CIACAP
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELJARAN
LPJ BELANJA - FUNGSIONAL

URUSAN PEMERINTAHAN : 2-18 PENANAMAN MODAL
 UNIT ORGANISASI : 2-18.0-00.0-00.1.1 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 SUB UNIT ORGANISASI : 2-18.0-00.0-00.1.1.0 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 PENGGUNA ANGGARAN : FERRY ADHI DHARMA, S.T., M.Si
 BENDAHARA PENGELJARAN : TRISMAWATI, S.Kom
 BULAN : Oktober

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	s.d BULAN LALU		BULAN INI		s.d BULAN INI		SPJ s.d BULAN INI SISA ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji	SPJ - LS Barang & Jasa	SPJ - LS Gaji	SPJ - LS Barang & Jasa	SPJ - LS Gaji	SPJ - LS Barang & Jasa	
5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.553.643.682,00	1.201.443.428,00	109.381.840,00	1.310.825.268,00	0,00	0,00	1.310.825.268,00	242.818.414,00
5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	127.472.628,00	87.251.873,00	8.856.509,00	106.108.382,00	0,00	0,00	106.108.382,00	21.364.246,00
5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	106.190.000,00	80.355.000,00	7.305.000,00	87.660.000,00	0,00	0,00	87.660.000,00	18.530.000,00
5.1.1.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	63.580.000,00	50.220.000,00	4.320.000,00	54.540.000,00	0,00	0,00	54.540.000,00	9.040.000,00
5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	47.054.850,00	36.854.950,00	3.300.000,00	40.154.950,00	0,00	0,00	40.154.950,00	6.900.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Printed By SIMDA-NIG | 1/1

Lampiran 11. Laporan Neraca dari FMIS



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP NERACA

Per 31 Desember 2023 dan 2022

SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan
Unit : 1-02.0-00.0-00.01.000 Dinas Kesehatan

URAIAN	2023	2022
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	(172.049.238.104,00)	0,00
Piutang Lainnya	2.557.536.800,00	0,00
Persediaan	21.825.915.304,10	21.825.915.304,10
JUMLAH ASET LANCAR	(147.665.785.999,90)	21.825.915.304,10
ASET TETAP		
Tanah	384.000.000,00	384.000.000,00
Peralatan dan Mesin	58.141.208.316,00	41.163.590.056,00
Gedung dan Bangunan	28.254.055.732,50	27.390.211.617,50
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.269.473.040,00	876.387.600,00
Aset Tetap Lainnya	30.325.106,00	30.325.106,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.036.438.532,00	202.411.732,00
Akumulasi Penyusutan	(43.722.796.310,00)	(43.722.796.310,00)
JUMLAH ASET TETAP	47.392.704.416,50	26.324.129.801,50
ASET LAINNYA		
Aset Tidak Berwujud	847.132.000,00	847.132.000,00
Aset Lain-lain	700.702.107,00	825.302.107,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(828.504.916,67)	(828.504.916,67)
JUMLAH ASET LAINNYA	719.329.190,33	843.929.190,33
JUMLAH ASET	(99.553.752.393,07)	48.993.974.295,93
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	(369.782,00)	0,00
Utang Belanja	7.967.754.540,00	86.232.241,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	462.663.900,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	8.430.048.658,00	86.232.241,00
JUMLAH KEWAJIBAN	8.430.048.658,00	86.232.241,00
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas	47.459.090.078,93	48.907.742.054,93
JUMLAH EKUITAS	47.459.090.078,93	48.907.742.054,93
JUMLAH EKUITAS	47.459.090.078,93	48.907.742.054,93
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	55.889.138.736,93	48.993.974.295,93

Lampiran 12. Laporan Realisasi Anggaran dari FMIS

 PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Agustus 2023 dan 2022				
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	REALISASI 2022
4	PENDAPATAN DAERAH	3.454.930.160.019.00	2.067.563.919.582.28	639.940.097.902.34
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	757.742.921.019.00	501.256.863.887.28	638.540.272.902.34
4.1.01	Pajak Daerah	291.146.059.979.00	218.508.049.516.00	280.277.331.102.00
4.1.02	Retribusi Daerah	27.438.619.990.00	11.842.781.499.00	43.16
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	57.822.000.000.00	59.035.543.342.00	19.297.418.212.00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	381.338.241.050.00	211.870.489.310.28	338.985.623.688.34
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.673.561.608.000.00	1.565.695.727.695.00	0.00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.409.279.608.000.00	1.416.528.880.173.00	0.00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	2.087.408.911.000.00	1.198.327.827.823.00	0.00
4.2.01.05	Dana Desa	321.870.697.000.00	218.201.052.350.00	0.00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	284.282.000.000.00	148.166.847.522.00	0.00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	284.282.000.000.00	148.166.847.522.00	0.00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0.00	682.000.000.00	0.00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	23.625.631.000.00	611.328.200.00	1.399.825.000.00
4.3.01	Pendapatan Hibah	23.625.631.000.00	611.328.200.00	1.399.825.000.00
5	BELANJA DAERAH	3.581.088.470.090.00	1.839.935.118.572.00	2.851.170.739.939.27
5.1	BELANJA OPERASI	2.517.571.978.994.00	1.395.261.919.114.00	2.314.618.212.120.27
5.1.01	Belanja Pegawai	1.435.374.656.303.00	873.349.473.749.00	1.276.453.887.914.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.256.592.300.00	62.914.724.258.00	921.959.780.434.27
5.1.05	Belanja Hibah	834.199.231.391.00	458.261.721.107.00	110.755.993.772.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.742.500.000.00	1.138.000.000.00	5.449.050.000.00
5.2	BELANJA MODAL	478.583.254.096.00	123.382.275.108.00	536.552.627.819.00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.900.000.000.00	383.661.310.00	3.763.063.239.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	148.474.754.344.00	33.582.242.225.00	118.865.464.138.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	181.159.511.953.00	13.416.729.288.00	128.312.176.222.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	137.431.864.988.00	69.479.217.385.00	276.843.982.414.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.310.811.711.00	6.495.424.900.00	8.767.841.808.00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	306.312.000.00	25.000.000.00	0.00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000.00	3.855.000.00	0.00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000.00	3.855.000.00	0.00
5.4	BELANJA TRANSFER	573.913.237.000.00	321.287.069.350.00	0.00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	24.408.140.000.00	0.00	0.00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	549.505.097.000.00	321.287.069.350.00	0.00
	SURPLUS / DEFISIT	(126.138.310.071.00)	227.628.800.960.28	(2.211.230.842.036.93)



Lampiran 13. Dokumentasi Sosialisasi PERBUB Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap



Lampiran 14. Dokumentasi Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD

